

LAPORAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2019



DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ijin-Nya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertaniandan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2019 ini disusun berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program sebagaimana ditetapkan pada Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

Pada Laporan Kinerja ini disajikan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Lingkungan Strategis yang berpengaruh, Renstra Dinas, Indikator Kinerja, Capaian dan Analisis Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Strategi Pemecahan Masalah, Capaian masing-masing Indikator Kegiatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan Kota Banjarbaru dimasa yang akan datang.

Banjarbaru, Januari 2020
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan Kota Banjarbaru,

HJ. SITI HAMDAN, SP, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19681229 199703 2 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan dalam bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan pada saat ini dalam rangka pemenuhan pangan dan gizi serta menambah pendapatan masyarakat yang dituangkan dalam tujuan SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru yaitu "Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah"

Untuk mencapai tujuan tersebut dituangkan dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis; (1) Meningkatkan Produksi Pangan dengan 3 indikator (a) peningkatan luas tanam (ha) dengan target 1.986 ha dan terealisasi sebesar 1.867 ha (b) Tingkat Kenaikan Produksi Ternak (%) dengan target 1,98 % (2.712.413 ekor) dan terealisasi sebesar 4,96 % (2.792.257 ekor) (c) Tingkat Kenaikan produksi ikan (%) dengan target 4,97 % (6.486,40 ton) dan terealisasi sebesar 6,51 % (6.930 ton); Sasaran Strategis ke (2) Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat dengan indicator Score PPH konsumsi dengan target 90,2 dan terealisasi sebesar 89,9; Sasaran Strategis ke (3) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Petani dengan indicator Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya dengan target 51 % dan terealisasi sebesar 51 %.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2019 mendapat dukungan dana sebesar Rp..20. 321.711.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.874.704.866,- yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan 2 (dua) sumber dana (APBD dan DAK). Untuk Belanja Tidak Langsung mendapat alokasi dana sebesar Rp. 9.794.390.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.642.364.335,-, sedangkan untuk Belanja Langsung (APBD-P dan DAK) mendapat alokasi dana sebesar Rp. 10.527.320.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.232.340.531,-

Masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan dilapangan dalam pencapaian target kinerja , baik bersifat teknis maupun non teknis, namun masih dapat dicari solusi dan pemecahannya, sehingga program dan kegiatan masih dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
<i>RINGKASAN EKSEKUTIF</i>	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas Pokok dan Fungsi	6
C. Struktur Organisasi	8
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	13
E. Permasalahan	15
F. Strategi dan Kebijakan	26
BAB II	31
PERENCANAAN KINERJA.....	31
A. Perjanjian Kinerja	31
BAB III	34
AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
B. Realisasi Anggaran	58
BAB IV	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran Tindak Lanjut.....	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu meningkat permintaanya sehingga semua orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya itu. Kebutuhan pangan akan meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dalam suatu wilayah. Ketersediaan pangan sebaiknya jumlahnya mencukupi serat, bermutu baik dan harga dapat dijangkau oleh masyarakat. Pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah.

Salah satu komoditas pangan utama yang paling dominan dikelola di setiap daerah di Kalimantan Selatan termasuk di Kota Banjarbaru adalah padi yang nantinya akan diolah menjadi beras sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kebutuhan pangan pada saat ini dan yang akan datang harus bisa terpenuhi, oleh sebab itu perlu suatu pendekatan baru dalam perkembangan pertanian maupun perikanan, agar kebutuhan pangan yang terus meningkat dapat terpenuhi dikarenakan terus bertambahnya jumlah penduduk yang terus berkembang.

Pembangunan dalam bidang pertanian maupun perikanan pada saat ini dalam rangka pemenuhan pangan dan gizi serta menambah pendapatan masyarakat. Pembangunan sektor pertanian dan perikanan dengan sistem agribisnis diharapkan dapat meningkatkan kuantitas, produktivitas, kualitas, pemasaran dan efisiensi usaha pertanian maupun perikanan, baik yang dikelola secara mandiri maupun kemitraan. Pembangunan pertanian dan perikanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru. Walaupun pelaksanaan

program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari kendala di sektor pertanian maupun perikanan yang juga menjadi isu strategis pada sektor tersebut, diantaranya lajunya pertumbuhan penduduk, konversi lahan pertanian yang masih tinggi, regulasi, kelembagaan dan sumberdaya manusia serta permodalan. Oleh karena itu dengan pemanfaatan pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada di sector pangan, pertanian maupun perikanan saat ini.

Pada setiap akhir pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan evaluasi kinerja melalui suatu hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dimana dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui pencapaian kinerja dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan di Kota Banjarbaru. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu bagaimana mewujudkan suatu Laporan kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil kinerja suatu organisasi pemerintahan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kota Banjarbaru, dan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru

adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Pangan dan Bidang Penyuluhan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan.

b. Fungsi

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah :

1. Perumusan kebijakan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja dalam bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang Ketahanan Pangan serta bidang Penyuluhan;
2. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pertanian dan Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Ketahanan Pangan serta Bidang Penyuluhan;
4. Pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat terhadap terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan dan Bidang Penyuluhan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang Ketahanan Pangan dan bidang Penyuluhan yang merupakan program kerja Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Perikanan sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- 2) Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tugas pada bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan perkebunan, bidang

perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;

- 5) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikannya Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan ;
3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan ;
- b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- c. Seksi Mutu Keamanan Pangan

d. Bidang Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Seksi Tanaman Pangan ;
- b. Seksi Hortikultura dan Perkebunan ;

e. Bidang Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Budidaya dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan;
2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan.

f. Bidang Peternakan, terdiri dari :

1. Seksi Produksi, Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan;

2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan SDM Penyuluhan dan Petani ;
2. Seksi Media Penyuluhan dan Kemitraan.

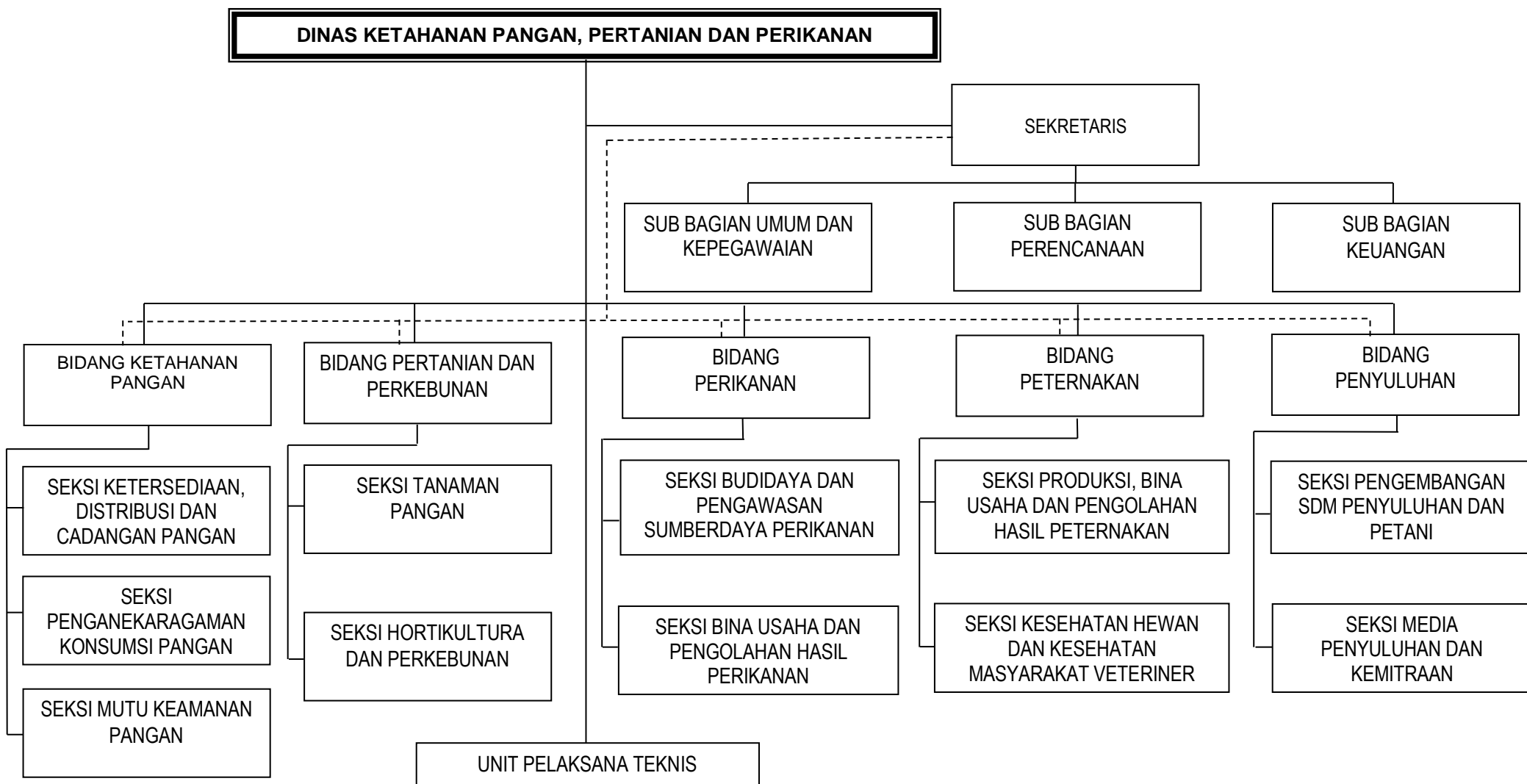
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari ;

1. UPT Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (PPBAT);
2. UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH);
3. UPT BPP Liang Anggang ;
4. UPT BPP Landasan Ulin ;
5. UPT BPP Banjarbaru ;
6. UPT BPP Cempaka ;
7. UPT Balai Pembibitan Ternak Pusat Kesehatan Hewan

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada bagan tersebut di bawah :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU**



Keterangan : — : Garis Komando ----- : Garis Koordinasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2019 didukung oleh 140 orang personil, yang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural sebanyak = 69 orang
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional sebanyak =28 orang terdiri dari :
 - 1). JFT Penyuluh = 4 orang
 - Terampil = 0 orang
 - Pelaksana Lanjutan = 1 orang
 - Ahli = 0 orang
 - Pertama = 13 orang
 - Muda = 6 orang
 - Madya = 4 orang
 - Penyelia = 0 orang
 - 2). JFT Analisis Pasar Hasil Pertanian = 1 orang
 - 3). JFT Medik Veteriner = 3orang
- c. Pegawai Non PNS sebanyak 43 orang terdiri dari :
 - 1). Pegawai Tidak Tetap (PTT) =3 orang
 - 2). Tenaga Kontrak = 24 orang
 - 3). THL-TB PP = 7 orang
 - 4). Non Register = 9 orang
- d. Pegawai Pusat/Provinsi Yang Diperbantukan
 - 1). Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Pangan =2 orang
 - 2). Penyuluh Perikanan =5 orang
 - 3). THL-TB Perikanan =4 orang
 - 4). Pengawas Benih Tanaman =1 orang

Tabel. 1.
Keadaan Pegawai

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		GOLONGAN	JUMLAH		ESELON	JUMLAH	
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr
1	SD			I/a			non eselon	23	46
2	SLTP	1		I/b			I.a		
3	SLTA	6	3	I/c			I.b		
4	D-I			I/d	1		II.a		
5	D-II			II/a			II.b		1
6	D-III	2	3	II/b	1	1	III.a		1
7	D-IV	1	1	II/c	3	1	III.b	4	1
8	S-1	20	41	II/d	3	1	IV.a	5	9
9	S-2	4	11	III/a	2	8	IV.b	3	4
10	S-3			III/b	3	10	V.a		
11	Pendidikan Profesi	1	3	III/c	8	18	V.b		
12				III/d	5	14			
13				IV/a	6	7			
14				IV/b	3	1			
15				IV/c		1			
16				IV/d					
17				IV/e					
	JUMLAH	35	62	JUMLAH	35	62	JUMLAH	35	62

Sumber data DKP-3 Tahun 2019

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Tantangan (*Threat*) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat negatif yang dapat mengakibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi meliputi :

- a Pengelolaan sumberdaya agribisnis dan penanganan daerah rawan pangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kerkelanjutan;
 - b Pengetahuan dan keterampilan petani, peternak, petani ikan dan pelaku usaha agribisnis Kota Banjarbaru relatif masih sederhana dan mengandalkan kondisi alam;
 - c Permodalan petani pelaku usaha agribisnis Kota Banjarbaru belum memasuki akses perbankan;
 - d Pengolahan hasil komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan memanfaatkan bahan baku dari luar daerah belum diperdayakan secara optimal;
 - e Investor dalam bidang agribisnis belum berkembang.
2. Peluang (*Opportunity*) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mencapai atau mampu melampaui pencapaian dalam mencapai visi dan misi meliputi:
- a Dukungan dan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan Legislatif dalam pengembangan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan terutama untuk pengolahan hasil (agroindustri);
 - b Akses transportasi dan informasi yang memadai untuk berhubungan dengan kabupaten dan kota lainnya;
 - c Adanya Lembaga Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi yang berbasis pertanian, peternakan dan perikanan baik negeri maupun swasta Kota Banjarbaru;
 - d Permintaan terhadap produk agribisnis cukup tinggi terlebih dengan adanya permintaan terhadap hasil pertanian yang organik;
 - e Letak Kota Banjarbaru yang strategis untuk memasarkan produk komoditi agribisnis yang dihasilkan.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut diatas dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru, karena itu dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru yang menjadi ruang lingkup SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru tidak terlepas dari Tantangan (*Threats*) dan Peluang (*Opportunities*) yang dihadapi selama tahun 2019 yang kemudian diimplementasikan menjadi visi dan misi, kemudian visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi tujuan.

Tujuan tersebut lebih lanjut diinterpretasikan menjadi sasaran. Upaya lebih lanjut untuk mencapai sasaran tersebut maka dibuatlah kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru.

Sehingga dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru dapat berjalan dengan baik. Kemudian dari program tersebut diimplementasikan menjadi kegiatan sebagai ujung tombak dari Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan ketersediaan dan keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya alamnya sendiri maupun sumberdaya manusianya sebagai pelaksana.

E. Permasalahan

Pembangunan periode 2016-2021 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya (2011-2015). Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang

ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta penanganan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta ketahanan pangan di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2016-2021, mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Pertambahan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya pertambahan penduduk baik karena kelahiran atau adanya perpindahan penduduk, menyebabkan terjadi kenaikan permintaan atas produk pangan. Tingginya kebutuhan akan bahan pangan dan produk pangan menyebabkan permintaan semakin tinggi tetapi tidak diimbangi dengan persediaan bahan pangan dan produk pangan yang berdampak kepada terjadinya kerawanan pangan.

Ditambah lagi pola pangan yang sama terutama kebutuhan akan beras yang semakin tinggi menyebabkan tingginya permintaan beras di masyarakat, hal tersebut tentunya memerlukan diversifikasi akan bahan pangan dan produk pangan.

2. Lahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan terkait dengan lahan adalah sebagai berikut:

a. Konversi lahan yang tidak terkendali

Keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian/perkebunan, perikanan dan kehutanan yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah dan perkebunan karet lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai areal pembangunan perumahan/pemukiman, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada pertanian/perkebunan, perikanan dan kehutanan.

b. Penurunan kualitas lahan

Sebagian besar lahan sector pangan, pertanian dan perikanan yang ada di Kota Banjarbaru sudah mengalami penurunan kualitas, bahkan ada yang termasuk kategori kritis. Hal ini akibat pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun. Disamping itu, produk-produk kimiawi tersebut, selain mengandung bahan yang diperlukan tanaman, dapat juga mengandung bahan kimiawi yang berbahaya (seperti senyawa klorin dan merkuri) bagi lahan dan makhluk hidup. Bila kondisi ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan kerusakan lahan semakin luas dan berakibat penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

c. Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit

Luas penguasaan lahan petani semakin sempit sehingga menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani, penyempitan penguasaan lahan mengakibatkan tidak efisien dalam berusaha tani.

d. Ketidakpastian status kepemilikan lahan

Kondisi kepemilikan lahan yang sering bermasalah antara lain disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian/perkebunan untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum, (2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah dan lahan perkebunan/ karet. Status penguasaan lahan oleh petani sebagian besar belum bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang. Otonomi daerah juga membawa akses peningkatan pemanfaatan lahan multi sektoral. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan yang ada maupun pembukaan lahan baru.

3. Infrastruktur

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah sistem pengairan atau jaringan irigasi. Ketiadaan waduk di Banjarbaru membuat sistem pengairan mengandalkan pada kondisi alam. Selain itu, prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi. Tantangan yang harus dihadapi ke

depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini secara memadai untuk dapat meningkatkan produksi dan menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan.

Disamping itu, masalah transportasi distribusi ternak belum optimal, yaitu tata niaga daging sapi domestik masih mengandalkan pada pengiriman sapi hidup dan masih memiliki hambatan, sehingga belum efisien. Penyebab inefisiensi diantaranya: belum memadainya jumlah dan kapasitas alat angkut (truk dan kapal) dan minimnya kualitas sarana angkutan baik truk maupun kapal yang digunakan. Belum semua pelabuhan memiliki holding ground untuk tempat pengumpulan ternak dan pemeriksaan karantina. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya retribusi selama proses pengangkutan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke daerah tujuan.

4. Sarana Produksi

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum perkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Benih merupakan sarana penting bagi usaha di bidang pertanian, apabila benih/ bibit yang tersedia tidak baik atau

palsu maka hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengadaan benih belum sesuai dengan musim tanam, biasanya benih sampai dilokasi setelah musim tanam dan kadangkala benih sudah kadaluarsa. Kondisi dikarenakan infrastruktur dan sistem perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi untuk usaha perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah kurang berdaya menangani perbenihan.

Dalam sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu.

Sistem perbibitan diperlukan untuk menjamin ketersediaan bibit ternak yang memenuhi kebutuhan dalam hal jumlah, standar mutu, syarat kesehatan, syarat keamanan hayati, serta terjaga keberlanjutannya yang dapat menjamin terselenggaranya usaha budidaya peternakan. Kelembagaan perbibitan ini untuk memfasilitasi tersedianya benih dan bibit ternak sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas benih dan bibit ternak serta pemanfaatan sumberdaya genetik ternak secara berkelanjutan.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi.

Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke

depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

5. Regulasi

Pengembangan sektor pertanian/perkebunan yang bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam saat ini dihadapkan dengan berbagai macam regulasi yang terkait dengan lingkungan. Selain itu, untuk mencapai sasaran yang diharapkan perlu regulasi dan kelembagaan untuk mensinergikan upaya yang saling mendukung untuk pencapaian sasaran dimaksud. Oleh karena itu, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan mutlak diperlukan, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing instansi. Regulasi juga diperlukan untuk melindungi pengembangan komoditas usaha di sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan ketahanan pangan. Pengembangan pertanian/perkebunan dan perikanan

memerlukan dukungan agar tercipta iklim yang kondusif melalui formulasi kebijakan.

Dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan pasar antar komoditas pangan semakin ketat. Komoditas impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan pengembangan pangan domestik. Produk impor lebih murah dari produk dalam negeri, karena pemerintah negara-negara eksportir melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai cara, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang lebih baik serta kontinuitas pasokan yang lebih terjamin.

Pemerintah daerah berupaya untuk mendorong program peningkatan produksi dengan empat strategi a) Peningkatan produktivitas, b) perluasan areal tanam, c) pengamanan produksi dari gangguan organisme pengganggu tanaman, dampak perubahan iklim dan kehilangan hasil pada saat panen dan pascapanen, dan d) perbaikan kelembagaan dan pembiayaan.

6. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Beberapa kondisi kelembagaan dan sumberdaya manusia saat ini secara umum, sebagai berikut:

- a. Kelembagaan petani, peternak dan petani ikan yang belum mempunyai posisi yang kuat

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian masih ada yang orientasinya hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang

akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

b. Keterbatasan Petani Dalam Pemanfaatan Teknologi

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan

tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian, sehingga mengakibatkan tingginya urbanisasi ke perkotaan.

c. Menurunnya Minat Generasi Muda

Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang, sangat menentukan terhadap minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini menyebabkan kesenjangan regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan, dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan.

Secara umum, mereka beranggapan bahwa sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi, baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir generasi muda kita terhadap pertanian, bahwa masih banyak potensi pertanian yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.

7. Permodalan

Permodalan petani merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usahatani. Berbagai upaya telah

dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah. Namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani.

Hal ini disebabkan antara lain sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, oleh karena itu perbankan menerapkan prudential perbankan. Dampak dari penerapan prudential perbankan dirasakan petani seperti sulitnya akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan, terbatasnya sosialisasi dan informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya pendampingan dan pengawalan petani yang membutuhkan permodalan dari perbankan.

Kondisi petani secara umum memiliki lahan sempit, skala usaha kecil dan letaknya yang menyebar dan lebih banyak sebagai buruh tani sehingga lebih mudah dilayani oleh pelepas uang/sumber modal non formal meskipun suku bunga tinggi tetapi waktu perolehannya lebih cepat.

Dengan terbatasnya pembinaan, pengawalan dan pendampingan bagi petani yang mengajukan kredit kepada perbankan untuk modal usaha tani serta tingkat kemauan membayar kembali kredit rendah merupakan salah satu faktor penghambat perbankan dalam menyalurkan kredit kepada petani.

F. Strategi dan Kebijakan

a. Visi

“MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN AGRIBISNIS YANG BERKARAKTER”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa terwujudnya ketahanan pangan dan agribisnis yang berkarakter adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya suatu kondisi ketersediaan pangan yang layak dikonsumsi dalam jumlah yang cukup pada tingkat individu, rumah tangga dan daerah baik dari segi mutu, beragam dan berimbang, merata, murah, aman, halal dan terjangkau oleh seluruh masyarakat dan mampu menggali potensi sumber pangan lokal sebagai penyedia pangan alternatif yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya agribisnis yang produktif, efisien, berdaya saing global dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu menjamin ketersediaan produk agribisnis yang mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kelangsungan yang akan datang.

b. Misi

Penjelasan Misi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. **MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI DAN KEARIFAN LOKAL**

Terpenuhinya tersediaan pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; aman; merata; dan terjangkau bagi setiap individu atau rumah tangga melalui diversifikasi pangan

yang berbasis pada Potensi dan Kearifan Lokal. Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
- b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama berdasarkan kehalalannya.
- c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di setiap wilayah.
- d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh oleh individu atau rumah tangga dengan harga yang terjangkau.
- e. Diversifikasi pangan merupakan proses pemanfaatan dan pengembangan bahan pangan yang beraneka ragam terutama ada yang ada di daerah sehingga penyediaan pangan tersebut dapat semakin beragam.

2. **MENGEMBANGKAN AGRIBISNIS YANG EFISIEN, TANGGUH, BERDAYA SAING GLOBAL, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH**

Sistim pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan menuju kepada suatu usaha agribisnis yang efisien, tangguh, berdaya saing global, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tambah sehingga mampu membuka peluang usaha dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan agribisnis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dengan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat dan swasta selaku pelaku usaha agribisnis dan pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi, secara bersama-sama menggunakan potensi yang dimiliki untuk memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan secara alami dan mandiri.
- c. Kemampuan suatu negara untuk berinovasi dalam rangka mencapai, atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan negara lain dalam sejumlah sektor sektor kuncinya
- d. Sistem terintegrasi antara praktik produksi tanaman dan hewan dalam sebuah lokasi dan dalam jangka panjang
- e. Pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.
- f. Pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.

c. Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru mendukung tujuan pada RPJMD meliputi :

- Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

b) Sasaran

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru turut mendukung tercapainya sasaran yang tertuang dalam RPJMD seperti :

1. Meningkatnya produksi pangan;
2. Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya petani.

c) Strategi

Strategi Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, yaitu :

1. Memanfaatkan potensi dari keragaman sumberdaya lokal untuk peningkatan ketersediaan pangan, dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan,
2. Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu dalam mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan cita rasa dan citra pangan khas Banjar, serta pengembangan produk dan mutu produk pangan bergizi,
3. Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan keseluruhan wilayah dan harus terjangkau oleh masyarakat,

4. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia pelaku agribisnis baik aparatur, petani maupun pelaku usaha.
5. Meningkatkan pengembangan teknologi dan sistem dalam usaha agribisnis yang mampu memberikan nilai tambah usaha tersebut.
6. Mempertahankan dan memelihara kesuburan tanah, sumber air dan kelestarian fungsi ekosistem lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan usaha agribisnis yang berkelanjutan.
7. Mendorong peningkatan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan pembangunan usaha agribisnis yang berorientasi kemandirian masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. SITI HAMDHAH, SP, MT

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. NADJMI ADHANI

Jabatan : WALIKOTA BANJARBARU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 2019

Pihak Kedua,
WALIKOTA BANJARBARU

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kota Banjarbaru

H. NADJMI ADHANI

HJ. SITI HAMDHAH, SP, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19681229 199703 2 003

Tabel. 2
Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Pangan	1. Peningkatan Luas Tanam (ha)	1.986 ha
		2. Tingkat Kenaikan Produksi Ternak (%)	1,98% (2.712.413 ekor)
		3. Tingkat kenaikan Produksi Ikan (%)	4,97% (6.486,40 ton)
2.	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan masyarakat	Score PPH Konsumsi	90,2
3.	Meningkatnya Kualitas Sumberdata Petani	Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya	51%

	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.362.951.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.271.448.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 68.969.000
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp 801.941.200
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rp 1.251.128.700
6	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp 1.824.327.800
7	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp 112.022.000
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp 425.937.500
9	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp 1.924.486.500
10	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp 1.354.496.200
11	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp 186.613.000
	JUMLAH	Rp10.584.320.900

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru memiliki tanggungjawab dalam menggunakan sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban pejabat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi pada pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Selanjutnya media akuntabilitas merupakan media pertanggungjawaban yang dapat menjadi alat oleh pihak yang memberi kewenangan untuk menilai kinerja pejabat pemerintah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

a. Kerangka Pengukuran Kinerja

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran bervariasi tergantung jenis indikator sasarannya. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah input, output dan outcome. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi dan merupakan suatu rencana yang dibuat pada awal tahun anggaran, dan selanjutnya pada akhir tahun akan dibandingkan dengan realisasinya yang merupakan pencapaian dari hasil pelaksanaan kinerja kegiatan, sehingga diketahui celah kinerja. Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan jika ada maupun keberhasilan yang dicapai, dan selanjutnya

terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang. Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Hasil Pengukuran kemudian dikategorisasikan ke dalam 5 (lima) kategori pencapaian kinerja sebagai berikut :

Tabel.3
Pengukuran Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

b. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis atas tingkat pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru untuk masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.4
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1.	Meningkatnya Produksi Pangan	1. Peningkatan Luas Tanam (ha)	1.986 ha	1.867 ha	94,01 %	Sangat tinggi

		2. Tingkat Kenaikan Produksi Ternak (%)	1,98% (2.712.413 ekor)	4,96 (2.792.257 ekor)	102,94 %	Sangat tinggi
		3. Tingkat kenaikan Produksi Ikan (%)	4,97% (6.486,40ton)	6,51% (6.930 ton)	106,84 %	Sangat tinggi
2.	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan masyarakat	Score PPH Konsumsi	90,2	89,9	99,67%	Sangat tinggi
3.	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Petani	Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya	51%	51%	100%	Sangat Tinggi

c. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangkamenwujudkan visi dan misi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru. Adapun evaluasi kinerja untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Produksi Pangan

Sasaran tersebut menjadi sangat penting karena berhubungan dengan produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan. Untuk mengukur Sasaran ini digunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama seperti pada Tabel berikut :

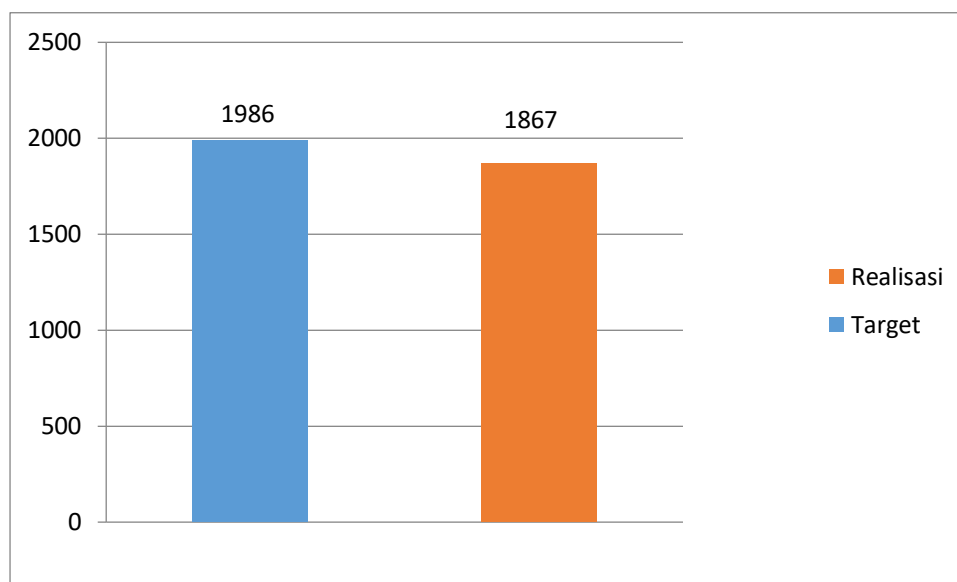
Tabel. 5.
Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Prosentase Kinerja Tahun 2018 $8 = 7/6 \times 100$	Target Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Produksi Pangan	1. Peningkatan Luas Tanam (ha)	Ha	1.854 ha	1.986 ha	1.867 ha	94,01 %	2.094 ha
		2.Tingkat Kenaikan Produksi Ternak (%)	%	1,95% (2.660.399 ekor)	1,98% (2.712.413 ekor)	4,96% (2.792.257 ekor)	102,94%	2,04%(2.823.400 ekor)
		3.Tingkat kenaikan Produksi Ikan (%)	%	5,49 % (6.506,34 ton)	4,97% (6.486,40 ton)	6,51 % (6.930 ton)	106,84 %	5,03 % (7.154,63 ton)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi Pangan masing-masing indikator tahun 2019 terhadap target sebagian besar telah terlampaui, namun ada satu target kinerja yang tidak tercapai yaitu target peningkatan luas tanam (dengan capaian 94,01 %). Untuk capaian kinerja nya pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Luas Tanam (Ha) di tahun 2019 ditargetkan 1.986 Ha dan terealisasi 1.867 Ha atau 94,01 %, dengan kategori capaian ***Sangat Tinggi.***

Diagram 1. Indikator Kinerja Peningkatan Luas Tanam (Ha)



Peningkatan Luas Tanam merupakan salah satu upaya meningkatkan produksi padi di Kota Banjarbaru selain menambah intensitas tanam. Pada Tahun 2019 peningkatan luas tanam belum mencapai target seperti yang telah ditentukan. Tidak tercapainya target peningkatan luas tanam ini diantaranya karena adanya serangan hama tikus pada saat tanam, adanya musim panas yang datangnya cenderung lebih cepat dan lama serta adanya alih fungsi lahan yang cukup tinggi, sehingga berpengaruh pada luas tanam. Data luas tanam di kota banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6. Data Luas Tanam Padi di Kota Banjarbaru Tahun 2019

No	Kecamatan/Desa)	Realisasi Tanam Padi (Ha)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
1	CEMPAKA	5.0	390.0	941.0	-	-	-	-	-	-	50	-	55	1,441.0
	Bangkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1.0
	Palam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sungai Tiung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2.0
	Cempaka	5.0	390.0	941.0	-	-	-	-	-	-	47	-	55	1,438.0
2	LANDASAN ULIN	-	10.0	63.0	-	-	-	-	-	-	13	-	-	86.0
	Landasan Ulin Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5.0
	Syamsudin Noor	-	10.0	63.0	-	-	-	-	-	-	7	-	-	80.0
	Guntung Payung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Guntung Manggis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1.0
3	LIANG ANGGANG	4.0	21.0	110.0	-	-	-	-	-	-	14	1.0	1.0	151.0
	Landasan Ulin Utara	1.5	1.0	5.5	-	-	-	-	-	-	2	1.0	1	12.0
	Landasan Ulin Tengah	1.5	6.0	72.0	-	-	-	-	-	-	4	-	-	83.5
	Landasan Ulin Barat	1.0	14.0	15.5	-	-	-	-	-	-	3	-	-	33.5
	Landasan Ulin Selatan	-	-	17.0	-	-	-	-	-	-	5	-	-	22.0
4	BANJARBARU UTARA	28.0	39.0	108.0	-	-	-	-	-	-	13	-	1.0	189.0
	Komet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mentaos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Loktabat Utara	-	5.0	10.0	-	-	-	-	-	-	5	-	1	21.0
	Sungai Ulin	28.0	34.0	98.0	-	-	-	-	-	-	8	-	-	168.0
5	BANJARBARU SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Loktabat Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kemuning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Guntung Paikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sungai Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		37.00	460.00	1,222.0	-	-	-	-	-	-	90.0	1.0	57.00	1,867.0

Dari tabel diatas terlihat realisasi jumlah luas tanam padi yang tersebar di wilayah Kota Banjarbaru sebesar 1.867 Ha. Realisasi Luas tanam tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan, hal ini antara lain disebabkan adanya serangan hama tikus pada saat tanam, adanya musim panas yang datangnya cenderung lebih cepat dan lama serta adanya alih fungsi lahan yang cukup tinggi, sehingga berpengaruh pada luas tanam.

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu

Berdasarkan tabel 5 di atas, terlihat bahwa realisasi tahun 2018 adalah sebesar 1.854 ha, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 1.867 ha terjadi peningkatan sebesar 13 ha (0,70%), hal ini disebabkan oleh sebagian besar petani sudah sadar dan mulai menerapkan teknologi pertanian diantaranya dengan melakukan 2 (dua) kali tanam dalam setahun dengan menggunakan bibit unggul (padi gogo).

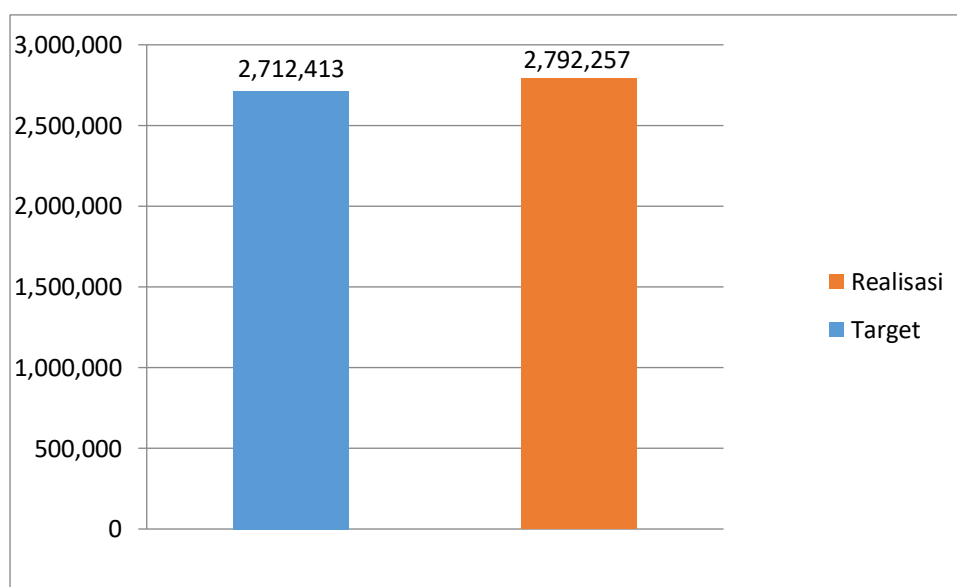
Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel 5 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Peningkatan Luas Tanam Tahun 2019 adalah 1.867 ha, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 sebesar 2.094 ha peningkatan luas tanam baru tercapai 89,16 %. Untuk target akhir RPJMD sebesar 2.094 ha kemungkinan tidak dapat tercapai, karena tingginya alih fungsi lahan pertanian di Kota Banjarbaru (sebagian besar petani di Kota Banjarbaru adalah petani penggarap bukan petani pemilik sehingga lahan pertanian sering berubah fungsi) serta belum adanya regulasi yang mengatur akan hal ini. Namun demikian, masih dilakukan berbagai upaya dari Dinas Ketahanan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru agar target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota dapat tercapai, diantaranya dengan melakukan penyuluhan dan bimbingan teknis maupun pelatihan tentang teknologi pertanian yang terus menerus kepada petani dan Kelompok Tani dan agar mereka mau menerapkan teknologi

yang didapat diantaranya dengan melakukan tanam 2 (dua) kali dalam setahun dengan menggunakan bibit unggul. Selain itu dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan, dilakukan pula dengan memberikan bantuan alat dan mesin pertanian, bibit dan pupuk kepada petani agar usaha mereka dapat terus dikembangkan, sehingga target peningkatan luas tanam dapat tercapai.

- b. Tingkat kenaikan Produksi Ternak di tahun 2019 ditargetkan 1,98 %(2.712.413 ekor) ekor dan terealisasi 4,96 % (2.792.257 ekor) atau 102,94 %, dengan kategori capaian ***Sangat Tinggi***.

Diagram 2. Tingkat Kenaikan Produksi Ternak (%)



Kenaikan tingkat persentase populasi ternak pada tahun 2019 sebesar 102,94% dimana capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Tercapainya target ini antara lain disebabkan adanya penyebaran ternak yang cukup banyak, baik dari anggaran APBD Kota Banjarbaru maupun adanya program BEKERJA dari Kementerian Pertanian RI. Program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) merupakan program terobosan Kementerian Pertanian dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan gizi untuk kecerdasan

generasi bangsa yang menjadi ujung tombak kemajuan Indonesia. Program BEKERJA ini tersebar di 13 provinsi di Indonesia dan salah satunya Provinsi Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ada 7 Kabupaten/Kota yang mendapatkan program Bekerja ini dan salah satunya Kota Banjarbaru. Program Bekerja ini berupa bantuan ternak itik dan pakan kepada RTMP (Rumah Tangga Miskin Pertanian). Untuk Kota Banjarbaru ada 715 RTMP yang mendapat bantuan, dan masing-masing mendapat 50 ekor itik. Sehingga ternak itik yang disebarkan sejumlah 35.750 ekor dan pakan itik sejumlah 107.250 Kg. Untuk data distribusi ternakProgram BEKERJA di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.

Rekapitulasi Distribusi Ternak Program Bekerja di Kota Banjarbaru

No	Kecamatan	Kelurahan	Jlh RTM Terdistribusi	Ternak Itik Terdistribusi (Ekor)	Pakan Terdistribusi (Kg)
1	Liang Anggang	Land. Ulin Utara	142	7.100	21.300
		Land. Ulin Selatan	2	100	300
		Land. Ulin Barat	3	150	450
		Land. Ulin Tengah	12	600	1.800
2	Landasan Ulin	Guntung Payung	34	1.700	5.100
		Guntung Manggis	92	4.600	13.800
		Land. Ulin Timur	20	1.000	3.000
		Syamsudin Noor	24	1.200	3.600
3	Banjarbaru Utara	Loktabat Utara	8	400	1.200
		Komet	1	50	150
		Mentaos	2	100	300

		Sungai Ulin	5	250	750
4	Banjarbaru Selatan	Kemuning	8	400	1.200
		Guntung Paikat	2	100	300
		Loktabat Selatan	7	350	1.050
		Sungai Besar	8	400	1.200
5	Cempaka	Palam	42	2100	6300
		Sunagi Tiung	71	3550	10650
		Cempaka	140	7000	21000
		Bangkal	92	4600	13.800
	Jumlah		715	35.750	107.250

Dari Tabel diatas terlihat jumlah ternak Itik yang terdistribusi di Kota Banjarbaru sebesar 35.750 ekor, sehingga ini juga cukup berpengaruh terhadap realisasi capaian populasi ternak.

Sedangkan untuk realisasi capaian produksi ternak Tahun 2019 yang tersebar di wilayah Kota Banjarbaru dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 8.
Data Populasi Ternak di wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2019

No.	Jenis Ternak	Kecamatan					Jumlah
		Bjb Utara	Bjb Selatan	Cempaka	LU	LA	
1	Sapi	646	97	454	555	655	2.407
2	Kambing	83	104	151	1.027	882	2.247
3	Ayam Ras	136.000	224.000	754.472	1.354.500	126.000	2.594.972
4	Ayam kampung (Ayam Buras)	3.812	11.545	20.424	19.925	8.620	64.326
5	Ayam Petelur	-	-	51.816	-	2.000	53.816
6	Itik	2.400	1.850	46.280	8.715	15.244	74.489
	Jumlah						2.792.257

Peternakan di Banjarbaru hampir sama dengan daerah lain meliputi peternakan hewan besar, kecil dan unggas. Dari Tabel 8 diatas terlihat populasi unggas (ayam ras, itik, ayam buras dan ayam petelur) menempati posisi teratas dalam jumlah populasi ternak di Kota Banjarbaru, baru diikuti populasi ternak besar (sapi) dan terendah pada populasi ternak kecil (kambing). Sektor Peternakan merupakan salah satu sektor unggulan di Kalimantan Selatan termasuk juga Kota Banjarbaru yang terus didorong untuk dikembangkan sehingga mampu menjadi daerah penyedia ternak. Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Perikanan untuk meningkatkan produksi ternak di Kota Banjarbaru, diantaranya dengan menambah sarana dan prasarana penunjang usaha peternakan yaitu dengan dibangunnya Klinik Hewan dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan (UPT BTPKH) untuk membantu masalah pembibitan ternak dan kesehatan hewan ternaknya, selain itu diadakan pula pelatihan dan penyuluhan tentang peternakan, baik masalah produksi maupun penyakit hewan, sehingga masyarakat ternak lebih memahami usahanya dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu

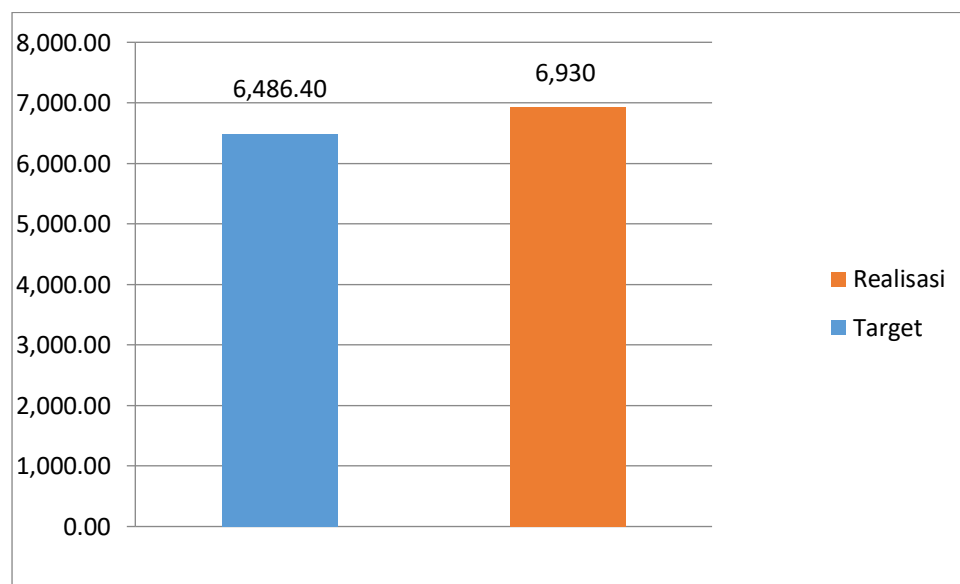
Berdasarkan tabel 5 di atas, terlihat bahwa realisasi tahun 2018 adalah sebesar 1,95 % (2.660.399 ekor) , jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 4,96 % (2.792.257 ekor) terjadi peningkatan sebesar 131.858 ekor, hal inidisebabkan adanya penyebaran ternak yang cukup banyak, baik dari anggaran APBD Kota Banjarbaru maupun adanya program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) dari Kementerian Pertanian RI, selain itu usaha di bidang peternakan sudah banyak diminati oleh masyarakat peternak, karena memiliki peluang usaha yang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel 5 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Tingkat kenaikan Produksi Ternak” Tahun 2019 adalah 2.792.257 ekor, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 sebesar 2.823.000 ekor baru tercapai 98,91 %, masih terdapat peluang pencapaian target akhir RPJMD tahun 2021 akan tercapai, mengingat usaha peternakan sekarang sudah mulai diminati oleh sebagian besar masyarakat peternak di Kota Banjarbaru, karena usaha di bidang peternakan memberikan peluang yang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta adanya perhatian dari Kementerian Pertanian RI khususnya bidang Peternakan untuk memberikan bantuan ternak kepada masyarakat miskin agar perekonomiannya meningkat, sehingga berdampak pula pada peningkatan produksi ternak.

- c. Tingkat Kenaikan Produksi Ikan di tahun 2019 ditargetkan sebesar 4,97% (6.486,40 ton) dan terealisasi sebesar 6,51 % (6.930 ton) atau 106,84 % dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Diagram 3. Tingkat Kenaikan Produksi Ikan (%)



Produksi Ikan terdiri dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Tercapainya target tersebut karena bidang perikanan

selain mendapatkan dukungan dana APBD Kota Banjarbaru, berupa pengadaan sarana dan prasarana budidaya seperti kolam biofloc dan benih ikan untuk pembesaran, juga mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan berupa bantuan benih ikan lele, nila, paket bantuan Unit Perbenihan Rakyat (UPR), pakan dan bantuan sarana prasarana perikanan yang langsung diserahkan kepada Unit perbenihan rakyat dan kelompok-kelompok budidaya ikan yang tersebar di kota Banjarbaru serta paket bantuan untuk kegiatan pengawasan dan kelestarian sumberdaya perikanan berupa benih ikan local untuk kegiatan Restocking (penambahan stock ikan/benih untuk ditebarkan di perairan umum). Untuk data jumlah produksi perikanan budidaya pembesaran ikan konsumsi dan produksi Tangkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9

Laporan Statistik Produksi Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2019

No	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)	Jenis Budidaya		
			Kolam	Keramba	Jaring Apung
	JUMLAH	6.860,0	6.040,00	230,00	590,00
1.	Ikan Mas	290,0	190,0	100,0	-
2.	Nila	2.570,0	1.850,0	130,0	590,0
3.	Gurami	1.350,0	1.350,0	-	-
4.	Patin	150,0	150,0	-	-
5.	Lele	1.785,0	1.785,0	-	-
6.	Betok	115,0	115,0	-	-
7.	Bawal Tawar	600,0	600,0	-	-
Jumlah Produksi Tangkap		70,0 Ton			

Dari tabel diatas terlihat jumlah produksi perikanan pada tahun 2019 yang terdiri dari perikanan budidaya sebesar 6.860,0 ton dan perikanan

tangkap sebesar 70,0 ton sehingga jumlah keseluruhan produksi perikanan di kota Banjarbaru Tahun 2019 sebesar 6.930,00 ton. Jumlah produksi perikanan budidaya terbesar adalah komoditas ikan Nila, Lele dan Gurami yang tersebar diseluruh wilayah kota banjarbaru, baik budidaya kolam, karamba dan jaring apung. Untuk produksi perikanan tangkap didapat dari danau –danau bekas galian tambang, sungai serta perairan rawa yang ada di kota Banjarbaru.

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu

Berdasarkan tabel 5 di atas, terlihat bahwa realisasi tahun 2018 adalah sebesar 5,49 % (6.506,34 ton), jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 6,51 % (6.930 ton) terjadi peningkatan sebesar 1,02 % (423,66 ton), hal ini disebabkan selain adanya dukungan dana dari APBD Kota Banjarbaru dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga disebabkan adanya teknologi budidaya perikanan yang mulai dikuasai dan diterapkan oleh pembudidaya ikan yang ada di Kota Banjarbaru, sehingga usaha pembudidaya lebih berkembang dan produksinya juga meningkat, serta adanya penambahan dana pinjaman untuk pengusaha budidaya ikan dari LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan bunga rendah.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel 9 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Tingkat kenaikan Produksi Ikan” Tahun 2019 adalah 6.930,00 ton, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 sebesar 7,154,63 ton baru tercapai 96,86 %. Masih terdapat peluang pencapaian target akhir RPJMD tahun 2021 akan tercapai, mengingat usaha budidaya ikan semakin diminati oleh masyarakat dan teknologi budidaya semakin berkembang dan mulai dikuasai dan diterapkan oleh

pembudidaya ikan dengan cara peningkatan padat tebar dan penggunaan bibit unggul yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi ikan.

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang mendukung untuk sasaran Meningkatnya Produksi Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah :

1) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

- a) Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
- b) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)
- c) Pengembangan Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai
- d) Pengembangan Sarana dan Prasarana Hortikultura
- e) Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura
- f) Pengembangan Benih/Bibit Unggul Hortikultura
- g) Pengembangan Usaha Perkebunan

2) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak
- b) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat
- c) Pengembangan Agribisnis Peternakan
- d) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Melalui Pembibitan dan Penetasan

3) Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak

- a) Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- b) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis
- c) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Masyarakat
- d) Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Kesehatan Ternak Milik Masyarakat
- e) Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Balai Pembibitan dan Pusat Kesehatan Hewan (DAK)

4) Pengembangan Budidaya Perikanan

- a) Pengembangan Bibit Ikan Unggul
- b) Pembinaan dan Pengawasan Kelestarian Sumber Daya Perikanan

- c) Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar
- d) Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)

5) Program Optimasiasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

- a) Peningkatan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

Sasaran Strategis 2

Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

Sasaran tersebut menjadi sangat penting karena menjadikan bahan perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan yang sesuai dengan potensi, sosial, budaya dan daya beli serta kehalalan. Untuk mengukur Sasaran ini digunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama seperti pada Tabel berikut :

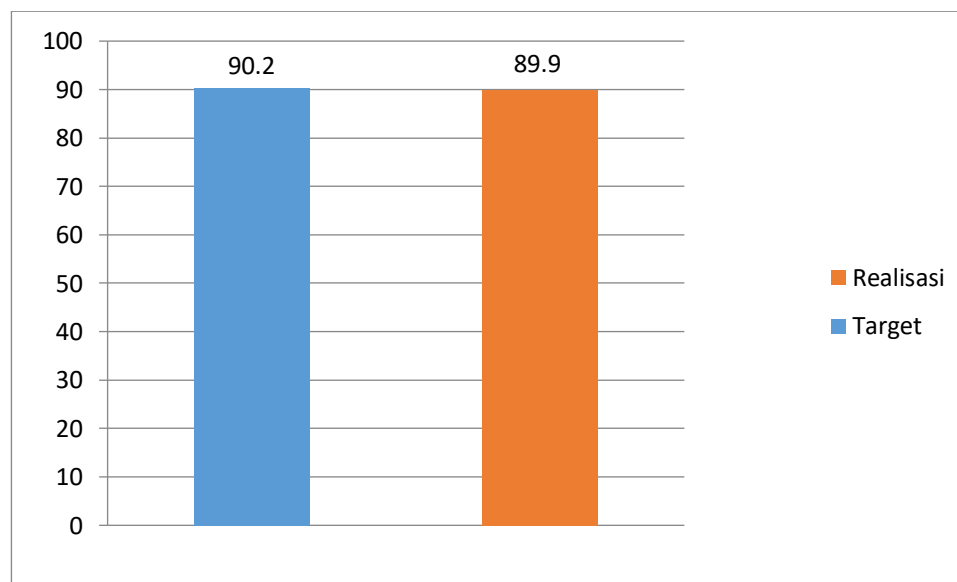
Tabel. 10
Capaian Kinerja Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Prosentase Kinerja Tahun 2019 $7 = 7/6 \times 100$	Target Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Score PPH Konsumsi	Scoring	89,20	90,2	89,9	99,67	91,2

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk sasaran Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat pada indikator Score PPH Konsumsi tahun 2019 terhadap target tidak tercapai. Walaupun tidak tercapai, angka tersebut sudah berada pada kategori capaian sangat tinggi (99,67%). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap capaian PPH ini diantaranya kurang beragamnya menu makan masyarakat, karena kebanyakan dari masyarakat di wilayah kita Kalimantan Selatan hanya cukup makan lauk saja dan kurang memperhatikan pentingnya bahan makanan yang lain terutama buah dan sayur, faktor pendapatan dan ekonomi keluarga serta faktor tingkat pendidikan dan pengetahuan dari masyarakat. Untuk capaian kinerja nya pada indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Score PPH Konsumsi di tahun 2019 ditargetkan sebesar 90,2 dan terealisasi 89,9 atau sebesar 99,67 %, dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Diagram 4. Score PPH Konsumsi



Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan

energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”. Dengan pendekatan PPH ini mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari score pangan (dietary score) dan dikenal sebagai skor PPH. Semakin tinggi score PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. Score PPH Kota Banjarbaru tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11
SKOR POLA PANGAN HARAPAN AKTUAL TAHUN 2019
KOTA BANJARBARU

No.	Kelompok pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian	948,3	53,1	47,4	0,5	26,5	23,7	25,0	23,7
2.	Umbi-umbian	22,8	1,3	1,1	0,5	0,6	0,6	2,5	0,8
3.	Pangan Hewani	332,7	18,6	16,6	2,0	37,2	33,3	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	184,0	10,3	9,2	0,5	5,2	4,6	5,0	4,6
5.	Buah/Biji Berminyak	9,8	0,6	0,5	0,5	0,3	0,2	1,0	0,2
6.	Kacang-kacangan	105,4	5,9	5,3	2,0	11,8	10,5	10,0	10,0
7.	Gula	63,1	3,5	3,2	0,5	1,8	1,6	2,5	1,6
8.	Sayur dan Buah	99,8	5,6	5,0	5,0	27,9	24,9	30,0	24,9
9.	Lain-lain	20,6	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	1786,5	100,0	89,3	11,5	111,3	99,5	100,0	89,9

Dari tabel diatas terlihat untuk Kota Banjarbaru skor PPH sebesar 89,9 dengan konsumsi energi sebesar 1.786,5 (89,3 % AKE), hal ini

menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat Kota Banjarbaru sudah semakin beragam dan berimbang. Konsumsi terbesar terletak pada konsumsi padi-padian sebesar 948,3 kkal (seharusnya 1.000 kkal) hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kota banjarbaru masih didominasi oleh kebiasaan makan dan adat istiadat mereka, bahwa kalau belum makan nasi artinya belum makan. Hal ini bisa dilihat dari pola konsumsi kota banjarbaru di kelompok padi-padian.

Sementara itu pangan hewani konsumsinya juga berlebih. Pangan hewani masih didominasi oleh konsumsi ikan yang mencapai 332,7 kkal (seharusnya 240 kkal). Hal ini dikarenakan bahwa kebiasaan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat kota Banjarbaru yang senang makan ikan, dan seterusnya diikuti dengan konsumsi bahan lainnya. Skor tersebut didapat dari hasil analisa dan pengumpulan data konsumsi pangan yang dilakukan dengan cara survey dengan metode food record (pencatatan) yang diisi oleh masing-masing responden dalam rumah tangga di kelurahan pada 5 Kecamatan di Kota Banjarbaru. Responden mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh setiap anggota rumah tangga, beserta Ukuran Rumah Tangga (URT) atau porsi makanan secara rinci, termasuk makanan dan minuman kemasan atau makanan jadi yang diberi atau dibeli di luar rumah.

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu

Berdasarkan tabel 10 di atas, terlihat bahwa realisasi tahun 2018 adalah sebesar 89,20, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 89,90 terjadi peningkatan sebesar 0,7 (0,78%), hal ini disebabkan oleh meningkatnya ekonomi masyarakat Kota Banjarbaru, sehingga kemampuan daya beli juga meningkat, terutama daya beli terhadap kebutuhan bahan pangan pokok keluarga, selain itu disebabkan pula masyarakat kota Banjarbaru sudah mulai selektif dalam membeli bahan pangan untuk di konsumsi, sehingga bahan pangan yang dibeli sudah memperhatikan kuantitas dan kualitas gizinya serta keberagaman

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel 11 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Score PPH Konsumsi” Tahun 2019 adalah 89,9, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 sebesar 91,2 baru tercapai 98,57 %, masih terdapat peluang pencapaian target akhir RPJMD tahun 2021 akan tercapai, dengan meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Untuk menarik minat masyarakat dalam mengkonsumsi pangan non beras diperlukan diversifikasi pangan melalui pengembangan teknologi pangan yang tidak hanya meningkatkan produksi berbagai macam bahan pangan, namun yang terpenting adalah merubah struktur bahan pangan yang dikonsumsi menjadi kecukupan gizi yang berimbang. Penganekaragaman pangan yang dilakukan bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras, tetapi juga untuk peningkatan gizi keluarga sehingga masyarakat bisa hidup sehat, aktif dan produktif serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, melalui konsep KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), penyuluhan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), pameran dan promosi (olahan pangan lokal), leaflet dan brosur.

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang mendukung untuk sasaran Peningkatan Pola Konsumsi pangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah:

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

- a) Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
- b) Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
- c) Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
- d) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- e) Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

- f) Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Landasan Ulin
- g) Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Banjarbaru
- h) Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Cempaka
- i) Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Liang Anggang
- j) Pendataan dan penyusunan Pola Konsumsi pangan
- k) Pendataan Jumlah penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
- l) Ketersediaan Pangan Masyarakat
- m) Pengembangan Informasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Pertanian

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Petani

Sasaran tersebut menjadi sangat penting karena sumberdaya petani merupakan salah satu ujung tombak agar produktivitas pertanian dan perikanan meningkat demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, pangan dan perikanan. Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 (satu) Indikator utama seperti pada tabel berikut:

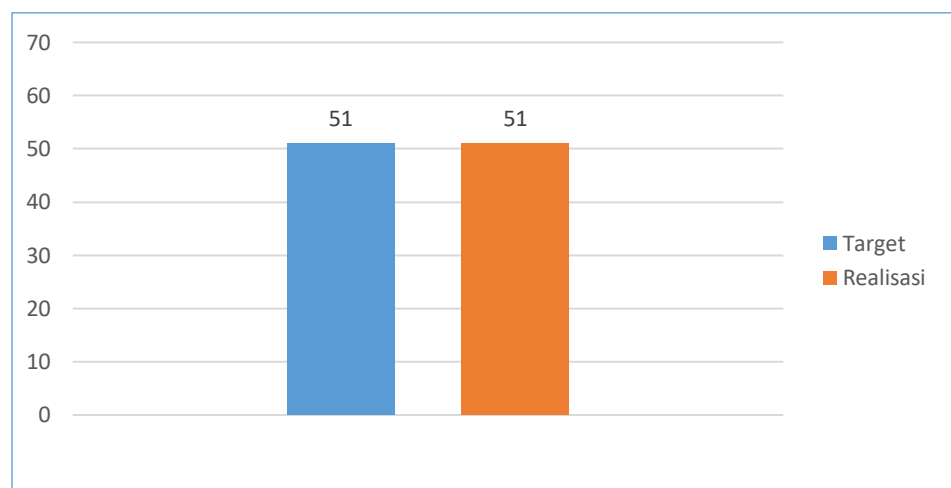
:

Tabel. 11
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Petani

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Prosentase Kinerja Tahun 2019 $8 = \frac{7}{6} \times 100$	Target Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Petani	Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkat Kapasitasnya	%	48	51	51	100 %	73

Indikator Kinerja Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan kapasitasnya di tahun 2019 ditargetkan sebesar 51% dan terealisasi 51% atau sebesar 100 %, dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Diagram 5. Indikator Kinerja Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya



Tahun 2019 dari 253 kelompok tani kelas pemula yang ditargetkan naik kelas lanjut adalah 51 kelompok tani dan dapat terealisasi sebanyak 51 kelompok tani yang naik kelas lanjut. Hasil ini tercapai dengan meningkatkan kerja penyuluh untuk melakukan pembinaan langsung ke kelompok tani baik secara teknis maupun administrasi kelompok taninya. Hasil ini juga tercapai dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Pusat Kementerian Pertanian yaitu Peningkatan Kelembagaan Petani melalui kenaikan kelas kelompok dan peningkatan skor indikator kemampuan kelompok tani sehingga kelompok tani sebagai wadah organisasi formal yang mendukung peningkatan kelembagaan didukung penuh untuk maju.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel 11 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator “Persentase Kelembagaan Petani yang meningkat Kapasitasnya “ Tahun 2019 adalah 51%, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 sebesar 73% baru tercapai 69,86 %

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang mendukung untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Petani yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah:

1) Peningkatan Kesejahteraan Petani

- a) Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (DAK)
- b) Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan metode Informasi UPT Banjarbaru
- c) Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan metode Informasi UPT Cempaka
- d) Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan metode Informasi UPT Liang Anggang
- e) Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan metode Informasi UPT Landasan Ulin
- f) Peningkatan Kemampuan Lembaga Penyuluhan, Pendampingan Petani dan pelaku Agribisnis

2) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

- a) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

B. Realisasi Anggaran

Sebagai instansi pemerintah yang mengemban tugas melaksanakan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di wilayah Kota Banjarbaru, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja guna mewujudkan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2019.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru pada Tahun 2019 ini mendapat dukungan dana sebesar Rp. 20.321.711.100 yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan 2 (dua) sumber dana (APBD dan DAK) dengan rincian berikut ini :

Tabel. 12
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.794.390.200	9.642.364.335
2	BELANJA LANGSUNG	10.527.320.900	9.232.340.531
	APBD	8.213.880.900	7.831.977.931
	DAK	2.313.440.000	1.400.362.600
	JUMLAH (1 + 2)	20.321.711.100	18.874.704.866

Dari alokasi dan realisasi tersebut, terbagi dalam beberapa program dan kegiatan yang mencakup seluruh urusan, baik urusan semua SKPD, urusan Pangan, pertanian dan perikanan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. URUSAN PANGAN

Tabel. 13
ANGGARAN, REALISASI FISIK DAN REALISASI KEUANGAN PADA URUSAN WAJIB DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERSENTASE (%)	
		ALOKASI	REALISASI	SALDO	ANGGARAN	FISIK
	Peningkatan Kesejahteraan Petani	801.941.200	593.230.600	208.710.600	73,97	100
1.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai	525.097.000	328.461.000	196.636.000	62,55	100

	Penyuluh Pertanian (DAK)					
2.	Peningkatan Sistem Insentif UPT BPP Landasan Ulin	34.383.800	34.383.800	0	100,00	100
3.	Peningkatan Sistem Insentif UPT BPP Liang Anggang	33.567.500	33.522.500	45.000	99,87	100
4.	Peningkatan Sistem Insentif UPT BPP Banjarbaru	47.905.500	46.923.000	982.500	97,95	100
5.	Peningkatan Sistem Insentif UPT BPP Cempaka	45.628.000	45.211.000	417.000	99,09	100
6.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Penyuluhan, Pendamping Petani dan Pelaku Agribisnis	115.359.400	104.729.300	10.630.100	90,79	100
	Peningkatan Ketahanan Pangan	1.251.128.700	1.202.526.700	48.602.000	96,12	100
7.	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	33.255.200	33.255.200	0	100,00	100
8.	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	242.160.000	240.275.000	1.885.000	99,22	100
9.	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	49.824.000	49.584.000	240.000	99,52	100
10.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	68.824.800	68.640.800	184.000	99,73	100
11.	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	105.406.200	105.346.200	60.000	99,94	100
12.	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Landasan Ulin	26.136.000	22.671.000	3.465.000	86,74	100
13.	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Banjarbaru	184.592.000	183.080.000	1.512.000	99,18	100
14.	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Cempaka	30.237.500	30.237.500	0	100,00	100
15.	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Liang Anggang	57.516.000	57.320.000	196.000	99,66	100
16.	Pendataan dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	68.240.000	67.400.000	840.000	98,77	100
17.	Pendataan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	47.677.000	47.677.000	0	100,00	100
18.	Ketersediaan Pangan Masyarakat	260.550.000	220.750.000	39.800.000	84,72	100

19	Pengembangan Informasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Pertanian	76.710.000	76.290.000	420.000	99,45	100
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	55.022.000	54.022.000	1.000.000	98,18	100
20.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	55.022.000	54.022.000	1.000.000	98,18	100
	JUMLAH	2.108.091.900	1.849.779.300	258.312.600	87,75	100

Pada urusan Pangan ini, realisasi keuangannya berkisar antara 62,55 % sampai dengan 100 %. Realisasi keuangan yang terendah (62,55%) terdapat pada Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh Pertanian (DAK), hal ini disebabkan adanya sisa dana kegiatan dan adanya penyesuaian pengurangan Dana DAK setelah DESK dengan Kementerian sebesar Rp. 193.575.150, sehingga dana DAK nya tidak bisa terserap 100 %, sedangkan fisiknya terealisasi 100 %. Selain itu pada kegiatan Ketersediaan Pangan Masyarakat realisasi keuangannya hanya sebesar 84,72 %, hal ini disebabkan adanya selisih harga pengadaan cadangan pangan beras dengan BULOG, pada saat rencana harga beras sebesar Rp. 12.500.000,-/ton, sedangkan pada saat pengadaan harga beras kurang lebih sebesar Rp. 10.500.000,-/ton, sehingga terjadi perbedaan harga sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,-/ton, sedangkan pengadaan beras adalah sebanyak 20 ton, namun demikian capaian fisiknya terealisasi 100 %. Walaupun realisasi keuangannya tidak seluruhnya 100 % akan tetapi realisasi fisiknya semuanya 100 %, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran pada urusan ketahanan pangan.

2. URUSAN PERTANIAN

Tabel. 14

ANGGARAN, REALISASI FISIK DAN REALISASI KEUANGAN PADA URUSAN PERTANIAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERSENTASE (%)	
		ALOKASI	REALISASI	SALDO	ANGGARAN	FISIK
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.824.327.800	1.238.856.500	585.471.300	67,91	100
1.	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	9.530.000	9.490.000	40.000	99,58	100
2.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)	804.000.000	314.100.000	489.900.000	39,07	80
3.	Pengembangan Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai	417.587.800	363.796.000	53.791.800	87,12	100
4.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Hortikultura	223.304.500	200.821.500	22.483.000	89,93	100
5.	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura	125.168.500	111.683.000	13.485.500	89,23	100
6.	Pengembangan Benih/Bibit Unggul Hortikultura	94.799.500	94.378.500	421.000	99,56	100
7.	Pengembangan Usaha Perkebunan	149.937.500	144.587.500	5.350.000	96,43	100
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	425.937.500	371.787.500	54.150.000	87,29	100
8.	Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner	26.810.000	24.472.500	2.337.500	91,28	100
9.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis	102.596.500	100.546.000	2.050.500	98,00	100
10.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Masyarakat	103.736.000	99.764.000	3.972.000	96,17	100
11.	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Kesehatan Ternak Milik Masyarakat	50.275.000	49.685.000	590.000	98,83	100
12.	Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Balai Pembibitan dan Pusat kesehatan Hewan (DAK)	142.520.000	97.320.000	45.200.000	68,29	100
	JUMLAH	2.250.265.300	1.610.644.000	639.621.300	71,58	100

Pada table diatas terdapat satu kegiatan dengan realisasi keuangan yang sangat rendah yaitu hanya sebesar 39,07 % dengan realisasi fisik hanya sebesar 80 %, hal ini disebabkan tidak bisa terlaksananya pelaksanaan 1 (satu) paket Jalan Usaha Tani (JUT) karena tidak tercapai kesepakatan dengan pemilik lahan untuk pembebasan lahan serta adanya penyesuaian pengurangan Dana DAK setelah DESK Kementerian sehingga realisasi keuangan dan fisik tidak bisa tercapai 100 %. Sedangkan pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Balai Pembibitan Pusat Kesehatan Hewan (DAK) realisasi keuangannya juga rendah yaitu hanya sebesar 68,29% namun realisasi fisiknya tercapai 100 %, hal ini disebabkan adanya sisa kontrak karena harga satuan yang tercantum dalam petunjuk teknis dari Kementerian terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasar yang ada di Kota Banjarbaru, sehingga keuangannya tidak bisa terserap 100 %. Untuk kegiatan lainnya capaian fisiknya dapat tercapai 100 %.

3. URUSAN PERIKANAN

Tabel. 15
ANGGARAN, REALISASI FISIK DAN REALISASI KEUANGAN PADA URUSAN PERIKANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERSENTASE (%)	
		ALOKASI	REALISASI	SALDO	ANGGARAN	FISIK
	Pengembangan Budidaya Perikanan	1.924.486.500	1.719.749.600	204.736.900	89,36	100
1.	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	794.369.500	790.150.000	4.219.500	99,47	100
2.	Pembinaan dan Pengawasan Kelestarian Sumber Daya Perikanan	36.380.000	35.880.000	500.000	98,63	100
3.	Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar	251.914.000	233.238.000	18.676.000	92,59	100
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)	841.823.000	660.481.600	181.341.400	78,46	100

4.	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	186.613.000	181.463.000	5.150.000	97,24	100
5.	Peningkatan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	186.613.000	181.463.000	5.150.000	97,24	100
	JUMLAH	2.111.099.500	1.901.212.600	209.886.900	90,06	100

Realisasi keuangan pada urusan perikanan program Pengembangan Budidaya Perikanan rata – rata sebesar 89,36 %. Pada program ini terdapat satu kegiatan yang realisasi keuangannya hanya sebesar 78,46 % namun realisasi fisiknya tercapai 100 %, yaitu pada kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK), hal ini disebabkan adanya sisa kegiatan dan adanya penyesuaian Dana DAK pada saat DESK dengan Kementerian.

Pada Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan realisasi keuangannya sebesar 97,24 %, akan tetapi realisasi fisiknya tercapai 100 %.

Walaupun realisasi keuangan pada Urusan Perikanan ini realisasi keuangannya tidak ada yang tercapai 100 % akan tetapi realisasi fisiknya pada seluruh Program dan Kegiatan dapat tercapai 100 %, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran pada urusan Perikanan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru kurun waktu satu tahun, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terutama mengacu kepada Rencana Kerja Tahun 2019 yang dibuat pada awal tahun. Pada dasarnya hampir semua kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana baik yang bersifat teknis maupun pembinaan.

Selama pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja per sasaran strategis rata-rata diatas 90 % dan ada yang capaiannya diatas 100%, ini berarti secara garis besar kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dapat dilaksanakan dan selesai pada waktunya, walaupun ada beberapa kendala teknis yang dihadapi dilapangan.

Masih terdapatnya beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, dimana terlihat pencapaian realisasi fisik dan keuangan yang kurang dari 100 %, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap pencapaian kinerja.

B. Saran Tindak Lanjut

Bercermin dari capaian kinerja evaluasi nilai akhir kinerja organisasi tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visinya, maka beberapa isu strategis yang masih perlu mendapat perhatian serius adalah:

1. Perlu adanya kebijakan dan regulasi untuk mengurangi laju alih fungsi lahan.
2. Mendorong keterlibatan stakeholder dalam pengembangan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Banjarbaru, mengingat

investor yang bergerak dalam bidang pangan, pertanian dan perikanan relatif masih rendah;

3. Menyusun dan menyebarluaskan data dan informasi potensi pertanian dan perikanan Kota Banjarbaru kepada pihak yang berkompeten, mengingat data dan informasi potensi sumber daya alam (SDA) pangan, pertanian dan perikanan belum dimanfaatkan optimal;
4. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dalam usaha pengembangan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Banjarbaru, mengingat sarana dan prasarana pendukung kegiatan masih terbatas;
5. Alokasi dana untuk ketahanan pangan, pertanian dan perikanan agar dapat lebih ditingkatkan;
6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani Kota Banjarbaru baik melalui kelompok tani ataupun secara mandiri;
7. Penguatan permodalan petani dalam pengembangan pangan, pertanian dan perikanan;
8. Mendorong pengolahan hasil komoditi pertanian, peternakan dan perikanan dengan memanfaatkan bahan baku dari luar kota, mengingat sumber daya alam (SDA) pertanian dan perikanan Kota Banjarbaru terbatas.